

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kabupaten Rembang

Setelah Berdarah-darah Raih WTP, Sekda Rembang: ke Depan Aset Harus Terus Ditata

<https://jateng.tribunnews.com/2019/07/25/setelah-berdarah-darah-raih-wtp-sekda-rembang-ke-depan-aset-harus-terus-ditata>

TRIBUNJATENG.COM, REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang baru tahun meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pencapaian itu diraih dengan jerih payah luar biasa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang, Subakti kepada Tribun Jateng mengatakan, demi meraih predikat WTP pihaknya bersama seluruh elemen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bekerja keras selama kurang lebih dua tahun.

Yang paling menonjol kenapa Rembang belum meraih predikat tersebut karena sengkabut penataan aset.

"Kami mengawali kegiatan 2017 itu pengelolaan aset. Karena salah satu faktor yang memicu kami belum bisa meraih WTP yaitu masalah pengelolaan aset. Ada sekitar Rp 1,5 triliun aset kami yang tidak diakui oleh BPK, sehingga kita saat itu memang gerakkan semua OPD khususnya pengurus barang untuk menyelesaikan aset yang oleh BPK masih diragukan sebesar 1,5 triliun," kata Subakti, Kamis (25/7/2019).

Dari pencatatan aset sebanyak itu, lanjut Subakti, ternyata masih menyisakan angka Rp 300 miliar dari total aset yang belum terdeteksi.

Nilai sebanyak itu tersebar di empat OPD besar, yaitu di Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, dan Sekretariat Daerah.

"Akhirnya kami lembur-lembur terus untuk penataan aset. Memang paling besar aset di 4 OPD itu. Mencarinya aset setengah mati. Misalnya bangunan gedung sekolah, sementara saya contohkan di SD saja kami mencari data dari 2002, kepala SD ganti berapa kali. Sementara Kepala SD sekarang kan tidak tahun-menahu," jelas Subakti.

Setelah berbagai upaya dilakukan, akhirnya pada Mei 2019 Kabupaten Rembang mendapat predikat WTP dari BPK. Hal itu ditandai dengan penerimaan penghargaan oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah.

Ke depan, kata Subakti, tentu dalam penataan aset ini akan terus diperhatikan. Pihaknya komitmen akan mengucurkan alokasi anggaran secara khusus demi penataan aset.

Selain itu, transparansi penggunaan anggaran serta akuntabilitas penggunaan keuangan yang sesuai perundangan juga menjadi perhatian pihaknya.